



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT PERIODE 2008-2010**

OLEH :

AGUNG BUDI SATRIO
05 151 021

Mahasiswa Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi

*Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG
2011**

No.Alumni Universitas	Agung Budi Satrio	No.Alumni Fakultas
a) Tempat/Tanggal Lahir: Bandung/1 Januari 1987 b) Nama Orang Tua: Arbianto, BE, S.Sos (Ayah), Azrida (Ibu) c) Fakultas: Ekonomi d) Jurusan: Ilmu Ekonomi e) No BP: 05 151 021 f) Tgl.Lulus: 2 Februari 2011 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3.01 i) Lama Studi: 5 Tahun 5 Bulan j) Alamat Orang Tua: Komplek Perumahan Cendana Blok M No. 11 Parupuk Tabing, Padang.		

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT PERIODE 2008-2010

Skripsi S-1 Oleh Agung Budi Satrio, Pembimbing Dr.Hefrizal Handra,M.Soc,Sc

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Sampel yang digunakan adalah relisasi anggaran dan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat periode 2008-2010. Alat analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dan regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan baik secara terpisah maupun serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Jika dilihat lebih mendalam, tingkat ketergantungan Belanja Daerah lebih dominan terhadap Dana Perimbangan daripada Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi flypaper effect.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 2 Februari 2011. Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan			
Nama Terang	Dr.Hefrizal Handra,M.Soc,Sc	Drs.Masrizal,M.Soc.Sc	Fery Andrianus, SE, M.Si

Mengetahui,

Ketua Jurusan : Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE,M.Ec.DEA,Ing
NIP.130812952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moral maupun material. Untuk melakukan pembangunan, pemerintah daerah membutuhkan anggaran belanja. Anggaran belanja daerah diperoleh dari sumber-sumber pendapatan yang dapat dikumpulkan daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah (PEMDA) dituntut untuk dapat menggali setiap potensi yang ada di daerahnya baik dari potensi sumber daya alam maupun dari sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut. Pemerintah Daerah (PEMDA) sangat memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan, agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan baik.

Tujuan kegiatan pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas taraf hidup dan kesejahteraan rakyat yang juga merupakan tulang punggung bagi pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk memperbesar pendapatan perkapita dan menaikkan produktivitas perkapita dengan jumlah menambah modal dan skill. Untuk itu Pemerintah Daerah (PEMDA) dituntut agar dapat mengembangkan seluruh sumberdaya yang dimiliki karena dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal dari Pemerintah Pusat (PEMPUS) maka PEMDA memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan sumberdaya yang ada di daerah tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari pemerintahan negara ditujukan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat (**Bratakusumah dan Solihin, 2001**). Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah diharapkan dapat memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Masyarakat akan berpikir ulang untuk membayar pajak atau retribusi lainnya jika kualitas dan kuantitas pelayanan publik tidak mengalami peningkatan (**Mardiasmo, 2002**). Untuk itu diperlukan pengelolaan anggaran belanja daerah, agar dapat memaksimalkan penerimaan daerah demi pembangunan ekonomi daerah.

Pada tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Dan kini seiring dengan semakin berkembangnya otonomi daerah, Undang-undang tersebut telah diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dari dana perimbangan tersebut. Pemerintah daerah juga mempunyai sumber

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD). Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dapat dihasilkan oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar alokasi dana yang dapat digunakan pada anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
2. Dana Perimbangan (DP) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD). Hal ini berarti semakin tinggi Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka semakin besar anggaran Belanja Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat.
3. Apabila dilakukan pengujian secara serentak tampak bahwa pengaruh Dana Perimbangan yang merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat lebih kuat dari pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal tersebut membuktikan bahwa terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2008-2010, artinya Kabupaten/Kota di Sumatera Barat masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat sebagai sumber pendanaan utama daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2000. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- _____, 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*
- _____, 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*
- Aebage, Rolf dan Langorgen, Audun, 1997. *Fiscal and Spending behavior of local governments: An Empirical analysis based on Norwegian data.* Statistic Norway, Discussion paper No. 196.
- Andersson, Lars. (2002). *The effect of Swedish local public expenditure of a change in Swedish intergovernmental grant system.* University of Lund, working paper.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Solihin, Dadang. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* Jakarta: PT. Gramedia
- Direktorat Jenderal PU Cipta Karya. 2007. *Buku Panduan Keuangan Daerah.* Jakarta.
- Gujarati, Damodar. 1978. *Ekonometrika Dasar.* Terjemahan oleh Drs. Sumarno Zain, MBA. 1999. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hidayat, Afri. 2009. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Skripsi).* Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S. Rosen, & Schuyler Tilly. (1994). *Intertemporal analysis of state and local government spending: Theory and test.* Journal of Urban Economics 35: 159-174.
- Prakosa, Kesit Bambang, 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa tengah dan DIY).* JAAI Volume 8 No. 2.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah.* Jakarta: Penerbit Erlangga
- Kweka, J.P dan Morrissey, O. 2000. *Government Spending and Economic Growth in Tanzania, 1965-1996.* Centre for Research in Economic Development and International Trade. University of Nottingham.